

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN TENTANG
KEABSAHAN TINDAKAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN
(Studi Kasus Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pontianak dan Bengkayang)**

Oleh:

Arri Djami

Abstrac

legal reasoning used by the Pre-Trial Judge in the case concerning the validity of foreclosure actions by investigators Forestry in accordance with the provisions of Law No. 8 of 1981 on Criminal Code (Criminal Code), because the provisions of Article 82 paragraph (3) letter d, and Article 95 paragraph (1) and paragraph (2) Criminal Procedure Code with description states that foreclosure actions by investigators (including investigators Forestry) is a substantive pretrial jurisdiction.

Keyword : Pretrial, foreclosure actions by investigators

Abstrak

Pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam perkara Praperadilan tentang keabsahan tindakan penyitaan oleh PPNS Kehutanan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya mengatur bahwa tindakan penyitaan oleh PPNS (termasuk PPNS Kehutanan) merupakan yurisdiksi substantif praperadilan.

Kata Kunci : Praperadilan, tindakan penyitaan oleh PPNS

Penadhuluan

Sistem pemerintahan negara yang telah dipertegaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan antara lain bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini mengandung makna bahwa dinegara yang berdasarkan atas hukum, hukum harus menampilkan peranannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang-perorangan, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan dasar tata cara peradilan pidana yang sudah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1981 hingga saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia, namun dalam undang-undang ini tampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah besar adalah bagaimana mencapai

tujuan tersebut sedemikian rupa, sehingga penyelewengan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memuat prinsip-prinsip atau asas hukum, diantaranya prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah/ konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mencermati hal tersebut di atas apabila seseorang yang ditangkap ataupun ditahan, disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan. Walaupun tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal ini Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi hak asasi manusia ternyata dalam prakteknya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh Pemohon Praperadilan. hal ini berarti belumlah tercapai apa yang menjadi tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Sebagaimana Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 03/Pid.Prap/2008/PN.Spt dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh : PT. Pelayaran Sahabat Kapuas, Terhadap Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Cq. Direktorat Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan H.M. Arsyad Km.15 Sampit, bahwa Pemohon mendasari mengajukan tuntutan atas tidak sahnya upaya paksa berupa penyitaan terhadap 2 (dua) buah Tug Boat dan 1 (satu) buah Tongkang beserta kelengkapan dokumen-dokumen kapal dan pelayaran. Dan Hakim Pengadilan Negeri Sampit menolak permohonan Pemohon serta menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon selaku penyidik di Dit Pol Air Sampit dinyatakan sah menurut hukum, karena tindakan upaya paksa berupa penyitaan yang

dilakukan oleh penyidik tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya Hukum Acara Pidana.

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Sampit mempertimbangkan bahwa Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan tata cara penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2) Jo. Pasal 129, kemudian Pasal 8, Pasal 75, Pasal 130, Pasal 40 jo. Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Terkait pula dengan Putusan Hakim mengenai praperadilan tentang keabsahan tindakan penyitaan oleh penyidik sebagaimana yang diuraikan dalam beberapa pertimbangan Putusan tersebut di atas, sebagai perbandingan adalah Putusan pengadilan Negeri Bengkayang, yang mana Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan, telah menjatuhkan putusan Nomor : 01/PID.PRA/2011/PN.BKY dalam perkara antara Kurnadi, selaku Pemohon lawan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sebagai Termohon. Bahwa Pemohon mendasari mengajukan tuntutan atas tidak sahnya upaya paksa penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat Eksavator merk Hitachi Zaxis 210 Mf, berdasarkan adanya upaya pekerjaan pemerataan jalan dan pembuatan helipad untuk pendaratan helicopter atas kunjungan Ka. Ops Intelijen TNI di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Kehutanan telah melakukan penyitaan terhadap eksavator merk Hitachi Zaxis 210 Mf sebagai barang bukti dalam tindak Pidana Kehutanan. Dalam Putusan perkara tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang memutuskan: Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHP, Pengadilan Negeri Bengkayang :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon praperadilan untuk sebahagian.
2. Menyatakan tidak sah pelaksanaan penyitaan alat berat jenis eksavator merk hitachi zaxis 210 Mf oleh Termohon yang didasarkan pada berita acara penyitaan tertanggal 2 Maret 2011.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan alat berat jenis eksavator merk hitachi zaxis 210 Mf kepada pemiliknya melalui Pemohon dan mencabut pengumuman penyitaan yang ada di eksavator tersebut.

Dalam Putusannya Hakim Praperadilan mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya persoalan

penyitaan barang atau benda yang tidak termasuk dalam alat pembuktian, merupakan objek praperadilan, oleh karena itu permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tentang apakah sah dan/atau telah memenuhi persyaratan yuridis, tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan alat berat jenis exsavator merk hitachi zaxis 210 Mf pada dasarnya merupakan objek Praperadilan, sehingga dengan demikian tidak merupakan *Error In Objekto*. Kemudian Hakim mempertimbangkan pula bahwa penyitaan alat berat jenis exsavator merk hitachi zaxis 210 Mf oleh Termohon telah bertentangan dengan Pasal 42 ayat 1 KUHAP dan oleh karenanya tindakan penyitaan terhadap alat berat oleh Termohon sebagaimana berita acara penyitaan harus dinyatakan tidak sah.

Di dalam pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menentukan: "Nahkoda tidak bertanggungjawab terhadap keabsahan atau kebenaran materiil dokumen muatan kapal, sedangkan perusahaan angkutan perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkut sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa penyitaan terhadap kapal beserta surat-suratnya adalah tidak sah, sehingga menurut pengadilan benda yang disita berupa kapal beserta surat-suratnya tidak termasuk alat pembuktian dan harus dikembalikan kepada pemohon atau dari siapa benda itu disita. Kewenangan Praperadilan secara spesifik sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan dengan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 97 KUHAP kewenangan pra peradilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi.

Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian yang timbul akibat adanya tindakan lain, tindakan lain dalam hal ini ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak berdasarkan hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982, pra peradilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain yaitu penyitaan dan penggeledahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan.

Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyebut secara tegas tentang penyitaan, tetapi hanya menyebut penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian ini tidak bersifat limitatif, ternyata Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif Praperadilan.

Permasalahan

1. Apakah yang menjadi dasar yuridis pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam perkara Praperadilan tentang keabsahan tindakan penyitaan oleh PPNS Kehutanan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?
2. Mengapa Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Bengkayang berbeda dalam menerapkan hukum dan mempertimbangkan Putusan tentang keabsahan tindakan penyitaan oleh PPNS Kehutanan?
3. Bagaimanakah seharusnya formulasi KUHAP dalam hal Praperadilan tentang keabsahan penyitaan oleh penyidik?

Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Oleh Hakim Dalam Perkara Praperadilan Tentang Keabsahan Tindakan Penyitaan Oleh PPNS Kehutanan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Dalam banyak hal upaya penegakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat hukum dan kultur masyarakatnya. Yang menjadi persoalan utama bukanlah kemungkinan turut sertanya polisi, jaksa, dan hakim atau kemauan mayoritas dalam badan yang berwenang menentukan sanksi hukuman tertinggi atau terakhir untuk menyelenggarakan kehendaknya, tetapi justru kepercayaan atau keyakinan bahwa sesuatu peraturan hukum harus dilaksanakan biarpun tanpa paksaan fisik. Tidak ada hukuman yang mengikat masyarakat, kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum dapat sepenuhnya berperan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, khususnya yang mengatur mengenai penyidik terutama pejabat penyidik pegawai negeri sipil (pejabat PPNS).

Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (didasarkan pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (berdasarkan Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (berdasarkan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP). Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun penyitaan yang tidak sah ataupun tidak berdasarkan hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang. Tindakan upaya paksa sering kali dilakukan penyidik, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan sewenang-wenang, atau dengan perkataan lain tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum.

Adapun yang menjadi dasar hukum praperadilan terhadap keabsahan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS) dikemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Dasar hukumnya adalah Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP (hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang dan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak).
2. Dasar hukumnya adalah Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, Pasal ini menjadi dasar bahwa penyitaan termasuk dalam yurisdiksi substantif praperadilan, dengan catatan bahwa apabila penyitaan tersebut telah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang dinilai hanya sebatas apakah pelaksanaan ijin/persetujuan tersebut telah sesuai atau melebihi, sedangkan apabila ijin/persetujuan tidak ada, maka merupakan yurisdiksi praperadilan (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang).
3. Dasar hukumnya Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, bahwa sah atau tidaknya penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya dan kuasa hukumnya melalui praperadilan untuk diperiksa. Penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Tersangka atau ahli warisnya dan kuasa hukumnya dapat mengajukan yang didasarkan pada Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Bagi tersangka atau pihak yang berkepentingan menuntut ganti rugi dengan berdasarkan pada Pasal 81 KUHAP (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak).
4. Dasar hukum praperadilan adalah Pasal 77 KUHAP, tetapi terkait dengan tindakan penyitaan diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP (hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian pada Polresta Pontianak dan Penyidik Kepolisian pada Polres Bengkayang).
5. Secara khusus tidak ada dasar hukum untuk praperadilan mengenai keabsahan tindakan penyitaan oleh penyidik. Kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP tidak termasuk tindakan penyitaan (tidak termasuk objek praperadilan (hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pontianak).
6. Dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dinyatakan bahwa tindakan penyitaan secara substantive juga merupakan yurisdiksi praperadilan, dan dalam hal tindakan upaya paksa seperti penyitaan oleh PPNS diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati (hasil wawancara dengan PPNS Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat dan Advokat/ Penasihat Hukum).

Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Kemudian dalam Pasal 77 KUHAP dinyatakan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jika berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, maka terlihat bahwa

tindakan penyitaan oleh PPNS Kehutanan tidak termasuk dalam pengertian dan kewenangan praperadilan. Namun jika didasarkan pada Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal, yaitu: dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita, maka keabsahan tindakan penyitaan oleh PPNS termasuk yurisdiksi praperadilan.

1. Faktor Yang Menyebabkan Hakim Praperadilan Di Pengadilan Negeri Pontianak Dan Pengadilan Negeri Bengkayang Berbeda Dalam Menerapkan Hukum Dan Mempertimbangkan Putusan Tentang Keabsahan Tindakan Penyitaan Oleh PPNS Kehutanan.

Salah satu tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Untuk penyidikan tindak pidana kehutanan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah PPNS Kehutanan.

PPNS Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan). PPNS Kehutanan merupakan pegawai Negeri Sipil instansi kehutanan pusat atau daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan). Praperadilan adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu ditakuti sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Tidak semua putusan praperadilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan.

Di dalam proses sidang pemeriksaan praperadilan tentunya akan mempertimbangkan fakta baik secara yuridis maupun fakta materiil. Dikabulkannya

praperadilan juga harus ditinjau lagi secara adil apakah karena suatu sebab yang disengaja atau suatu sebab yang berasal dari luar proses penyidikan. Adanya praperadilan adalah untuk menjaga agar penyidik tidak sewenang-wenang serta untuk mengawal agar proses penyidikan dan atau penuntutan berjalan dengan mekanisme yang diatur di dalam KUHAP. Yang terpenting di dalam suatu proses penyidikan adalah penyidik harus bersikap netral, professional dan proporsional. Apabila diyakini bahwa proses penuntutan tersebut telah dilaksanakan secara professional dan tidak memihak rasanya tidak ada yang perlu dirisaukan dan juga dikhawatirkan.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik atau pihak-pihak lain yang berkompeten terhadap proses penyidikan. Untuk mengurangi kesalahan dan keberpihakan penyidik dalam proses penyidikan. Pengawas penyidikan juga dijabat oleh seorang perwira yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang penyidikan. Kerja pengawas penyidikan ini bersifat independen. Selain itu mekanisme pengawasan internal juga berlaku terhadap setiap keberatan atau komplain dari pihak-pihak tertentu. Hal ini tidak lain menunjukkan adanya transparansi di dalam proses penyidikan. Oleh karena itu pra peradilan adalah suatu hal yang wajar dalam proses penyidikan dan untuk menjamin hak-hak tersangka atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

Adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam praperadilan mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik/PPNS Kehutanan seperti tersebut di atas menimbulkan perbedaan pandangan dari aparat penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkayang dan Pontianak sebagai berikut:

1. Dilihat dalam Pasal 77 ayat (1) KUHAP tidak ada diatur tentang upaya paksa berupa penyitaan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun PPNS, tetapi Pasal 77 ayat (1) KUHAP tersebut tidaklah bersifat limitatif, dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, tindakan penyitaan adalah secara substantif juga merupakan objek praperadilan, namun harus dilihat dan dicermati terlebih dahulu apakah tindakan penyidik tersebut telah sesuai dengan Pasal 38 KUHAP tentang penyitaan (hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang).
2. Selain tidak jelasnya aturan dalam KUHAP yakni Pasal 77 ayat (1), juga dalam praktek sehari-hari, hampir praktis, lembaga praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan untuk menilai tentang penyitaan kecuali dari hal-hal yang sangat prinsip, permohonan praperadilan jarang sekali dikabulkan. Hal tersebut disebabkan kepada pemahaman hakim yang tidak mendasarkan kepada penilaian syarat-syarat subyektif penyidik sebagaimana diatur di dalam pasal 38 KUHAP, tentang penyitaan. Lembaga praperadilan praktis hanya memeriksa dokumen surat-surat, misalnya izin penyitaan oleh Ketua Pengadilan, pemahaman hakim yang didasarkan kepada pemeriksaan dokumen surat-surat tersebut sama sekali tidak menyentuh essensi dari pemaknaan

lembaga praperadilan tersebut (hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak).

3. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan tidak adanya ketegasan dalam KUHAP, apakah penyitaan adalah yurisdiksi praperadilan atau bukan, karena di samping apa yang dinyatakan dalam Pasal 77 KUHAP, kewenangan praperadilan juga diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP. Untuk menyelaraskan kedua pasal tersebut dan untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, maka dapat diterapkan bahwa untuk penyitaan tanpa persetujuan/ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, maka sudah seharusnya penyitaan tersebut masuk dalam yurisdiksi praperadilan. Untuk yang telah mendapat persetujuan/ijin Ketua Pengadilan Negeri, maka hanya terbatas pada apakah pelaksanaan penyitaan telah sesuai ataukah melebihi apa yang disetujui/diijinkan (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak).
4. Keputusan hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan pemohon praperadilan mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, karena kedua ketentuan tersebut tidak memasukkan tindakan penyitaan dalam pengertian dan kewenangan praperadilan (hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian pada Polresta Pontianak dan Penyidik Kepolisian pada Polres Bengkayang).
5. Secara substansi putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan pemohon praperadilan mengenai keabsahan tindakan penyitaan oleh penyidik Polri/PPNS Kehutanan, telah menyimpang dan lingkup objek praperadilan di mana secara jelas atau secara limitatif diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Namun demikian, pasal-pasal dalam KUHAP terlihat adanya celah hukum, sehingga terjadi perbedaan penafsiran oleh hakim. Celah hukum yang dimaksud seperti Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP (hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pontianak).
6. Putusan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk menilai keabsahan tindakan penyitaan, kecuali dalam hal yang sangat prinsip. Permohonan praperadilan jarang sekali dikabulkan oleh hakim praperadilan, hal ini disebabkan pemahaman hakim yang tidak mendasarkan pada penilaian syarat-syarat subyektif penyidik. Selain itu upaya praperadilan tidak hanya sebatas pada ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun upaya praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian atau seseorang yang dikenai tindakan lain tanpa alasan menurut undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (hasil wawancara dengan PPNS Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat dan Advokat/ Penasihat Hukum).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP tidak memasukan tindakan penyitaan oleh penyidik sebagai bagian dari pengertian dan kewenangan praperadilan, sehingga banyak hakim praperadilan yang kaku menerapkannya, artinya jika tidak termasuk dalam kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, maka hal tersebut bukan kewenangan praperadilan. Namun di sisi lain terdapat ketentuan dalam KUHAP yang memberikan pengaturan mengenai yurisdiksi substantif praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 97 KUHAP yang

memperkuat adanya kewenangan praperadilan mengenai keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik (PPNS Kehutanan).

Pasal 38 KUHAP menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam hal penyitaan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya. Dalam hal penyitaan telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri tetap dapat diajukan ke praperadilan dalam lingkup kewenangan yang lebih sempit, yaitu: praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin/persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri. Yang dinilai praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak.

Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP menyatakan dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka/dari siapa benda itu disita. Kemudian Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebut secara tegas tentang penyitaan tetapi hanya menyebut penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan/penuntutan, karena tidak bersifat limitative, maka Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP memasukan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif praperadilan.

2. Formulasi KUHAP Dalam Hal Praperadilan Tentang Keabsahan Penyitaan Oleh Penyidik

Praperadilan sebagai salah satu proses hukum yang dapat diupayakan dalam suatu proses hukum haruslah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Namun dalam kenyataannya praperadilan masih menimbulkan masalah tersendiri. Masing-masing pihak yang berperkara memiliki agumen tersendiri yang menyatakan bahwa dirinya adalah pihak yang benar. Praperadilan yang bersifat sebagai “peradilan awal” sebelum benar-benar masuk dalam ruang lingkup peradilan yang sesungguhnya haruslah dimengerti secara menyeluruh. Baik secara pengertian, ruang lingkup maupun proses peradilan itu sendiri. Praperadilan, dalam istilah hukum Indonesia, adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: (a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; (b) Sah atau

tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demitegaknya hukum dan keadilan; (c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, apapun yang diputus oleh praperadilan adalah yang khas, spesifik, dan mempunyai karakter sendiri, sebab di sini hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Sifat praperadilan tersebut akan berfungsi sebagai pencegahan terhadap upaya paksa sebelum seseorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan yang dimaksud disini dapat berupa pencegahan terhadap tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara serta pencegahan terhadap tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan.

Menurut KUHAP, yang termasuk dan menjadi lingkup praperadilan meliputi perkara: a. Sah atau tidaknya penangkapan; b. Sah atau tidaknya penahanan; c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan; d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan; e. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan; f. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan; g. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan; dan h. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan.

Adapun alasan-alasan sahnya untuk penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangansaksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai.

2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secaranyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka kemudian penyidik menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.

3. Penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undang-undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain

tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, serta karena peristiwa hukum tersebut telah kadaluarsa.

Adapun subjek hukumnya adalah sebagai berikut: 1. Yang berhak mengajukan upaya praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi adalah: a. Tersangka; b. Keluarga tersangka; c. Ahli waris tersangka; d. Kuasa hukum tersangka; dan e. Pihak ketiga yang berkepentingan. 2. Yang berhak mengajukan upaya gugatan pra peradilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah: a. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan; b. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. 3. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah: a. Saksi korban tindak pidana; b. Pelapor; c. Organisasi non pemerintah dan LSM, yang mana ini dimaksudkan untuk memberi hak kepada kepentingan umum terkait tindak pidana korupsi, lingkungan, dan lain-lain.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa keberadaan lembaga praperadilan dinormatikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian mengenai dasar kewenangan praperadilan dinyatakan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selain kewenangan seperti tersebut di atas, terdapat juga ketentuan dalam KUHAP yang memberikan kewenangan praperadilan untuk melakukan upaya paksa berupa penyitaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d, yaitu Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari *politik criminal*, melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Atau dapat juga merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Salah satu bentuk pembaharuan substansi hukum pidana khususnya hukum pidana formal dan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, maka perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaharuan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas dan wewenangnya.

Dalam hubungannya dengan formulasi KUHAP terkait dengan praperadilan tentang keabsahan penyitaan oleh penyidik, maka dikemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penyitaan sebagai objek praperadilan harus diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 ayat (1) KUHAP agar tidak terdapat perbedaan penafsiran. Secara yuridis penyitaan diatur dalam KUHAP dan penyitaan termasuk objek praperadilan, kemudian secara sosiologis praperadilan merupakan suatu sarana bagi pencari keadilan khususnya pihak-pihak yang merasa bahwa ada pelanggaran terhadap hak-hak privasinya, dan kesewenang-wenangan penyidik dalam hal tindakan penyitaan (hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang).
2. KUHAP harus lebih tegas mengatur tentang keabsahan penyitaan oleh penyidik, bahkan perlu revisi terhadap KUHAP yang ada sekarang ini. Secara yuridis praperadilan tentang keabsahan penyitaan oleh penyidik (PPNS) telah sesuai dengan ketentuan KUHAP yakni Pasal 82 ayat (3) huruf d, kemudian jika dilihat dari tujuannya, lembaga praperadilan yang memeriksa dan mengadili kewenangan penyidik melakukan penahanan, memeriksa bukti permulaan yang cukup dan memeriksa syarat-syarat subyektif, sebenarnya melambangkan pemikiran konsepsi keadilan yang merupakan tujuan dari praperadilan, bahkan tujuan dari lembaga praperadilan berangkat dari konsepsi keadilan yang merupakan makna hakiki sebelumnya diperiksa perkara pokok tersebut dimuka pengadilan (hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak).
3. Walaupun kewenangan penyidik PPNS diatur dalam undang-undang tersendiri seperti PPNS Kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, namun terkait dengan hukum acaranya tetap berdasarkan KUHAP, sehingga pengertian praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dan kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP harus juga

memasukan penyitaan sebagai objek praperadilan, sehingga tidak salah dalam menerapkan hukum. Selain itu Pasal 82 ayat (3) huruf d harus dipertegas lagi agar terlihat adanya kepastian hukum. Secara yuridis penyitaan oleh penyidik/PPNS kehutanan telah jelas pengaturannya, sehingga perlu diperkuat dalam KUHAP. Secara sosiologis bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik/PPNS kehutanan sering dilakukan tidak sesuai dengan KUHAP, sehingga diperlukan pengaturan tindakan penyitaan yang merupakan kewenangan praperadilan agar tidak terjadi tindakan penyitaan secara sewenang-wenang, sehingga tujuan hukum dapat tercapai (rangkuman hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dan Pengadilan Negeri Pontianak, wawancara dengan Jaksa, Penyidik Polri dan PPNS Kehutanan, serta Advokat).

Berdasarkan data di atas tergambar adanya keinginan seluruh aparat penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkayang dan Pengadilan Negeri Pontianak, agar dilakukan formulasi KUHAP dalam hal praperadilan tentang keabsahan penyitaan oleh penyidik, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai pertimbangan hukum praperadilan terkait dengan keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik/PPNS Kehutanan.

Formulasi KUHAP dalam hal praperadilan tentang keabsahan penyitaan oleh penyidik dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam praperadilan mengenai keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik/PPNS Kehutanan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang dikarenakan ketidakjelasan pengaturannya dalam KUHAP.

Penutup

1. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam perkara Praperadilan tentang keabsahan tindakan penyitaan oleh PPNS Kehutanan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya mengatur bahwa tindakan penyitaan oleh PPNS (termasuk PPNS Kehutanan) merupakan yurisdiksi substantif praperadilan.
2. Faktor yang menyebabkan Hakim Praperadilan Di Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Bengkayang berbeda dalam menerapkan hukum dan mempertimbangkan putusan tentang keabsahan tindakan penyitaan oleh PPNS Kehutanan, yaitu faktor kurang tegasnya KUHAP dalam mengatur kewenangan praperadilan mengenai keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik/PPNS Kehutanan; dan faktor hakim praperadilan kaku dalam menerapkan aturan, di mana dalam menilai kewenangan atau yurisdiksi praperadilan semata-mata didasarkan pada Pasal 77 KUHAP,

padahal selain itu juga terdapat beberapa Pasal dalam KUHAP yang memberikan kewenangan atau yurisdiksi kepada praperadilan untuk menilai keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik/PPNS Kehutanan seperti yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP.

3. Formulasi KUHAP dalam hal praperadilan tentang keabsahan penyitaan oleh penyidik dilakukan dengan memasukan penyitaan dalam pengertian dan kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, sehingga adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan perbedaan dalam pertimbangan hukum praperadilan mengenai keabsahan tindakan penyitaan oleh penyidik/PPNS Kehutanan.

Daftar Pustaka

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.

-----, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, termasuk interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.

Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 2008, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.

Atmasasmita, Romli, 14-18 Juli 2003, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII”, Denpasar.

Dirdjosisworo, Soedjono. Bertrand Russell, 1983, *Cita-Cita Politik*, Armico, Bandung.

Eliandi, Tito, 2008, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Suatu Tulisan.

Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermawati, Irma, "*Sekilas Tentang Praperadilan*", *Suara Satwa*, Volume XI No.2/April-Juni 2007.

Kepala Pusat Informasi Kehutanan, 19 Januari 2004, Siaran Pers, Nomor : S.44/II/PIK-1/2004, Jakarta.

Kusumah, Mulyana W. *Perspektif*, 1986, *Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, Buku II Edisi 2007, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, 1988, *Metode Penelitian Nuturalistik-kualitatif*, Tarsito, Bandung.

Poerwadarminta. WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1982, Penerbit Departemen KeHakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga.

Poernomo, Bambang, 1982, *Hukum Acara Pidana dan Pandangan Terhadap Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wiryono, 1985, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.

Schaffmeister Dkk, 2007, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, dan Mamoedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Rajawali, Jakarta.

Sudjito, 10 Januari 2011, *Pembaharuan Lembaga Praperadilan*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suparman, Eman, 12-13 Nopember 1996, "*Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa*", Makalah Pada Seminar Nasional Tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan Dan Restrukturisasi Global, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Zulkarnain, 2006, *Praktik Peradilan Pidana*, IN-TRANS, Malang.